

Implementasi Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan dan Tak Takut Kepanasan) Guna Merahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya

Novia Nilam Sari¹, Indah Murti², Dida Rahmadanik³

^{1, 2, 3} Program Studi Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: didarahma@untag-sby.ac.id

Abstract

Rehabilitating uninhabitable houses that are still scattered in the city of Surabaya by looking at what things often happen when the program is running well. from program implementers to beneficiaries who in this program work together in the implementation process. This research is descriptive qualitative research. The subjects of this study were the head of the rehabilitation section for uninhabitable houses, hot tofu program assistants in the field, and beneficiaries of the hot tofu program. The research instrument is the researcher himself. Data collection techniques are interview techniques, observation, and documentation. The data analysis technique used is the interactive analysis technique. The theory used in this study uses the opinion put forward by Van Meter Van Horn, which consists of six variables, namely policy size, and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, inter-organizational communication and the socio-political environment. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the Hot Tofu program in rehabilitating uninhabitable houses in the city of Surabaya is going well even though there are several problems, namely, regarding human resources and material resources or materials used for building houses, this is what finally slowing down the development process so that it is often not in accordance with the scheduled time.

Keywords: Implementation, Tahu Panas Program, Rehabilitation

I. Pendahuluan

Memiliki rumah layak huni merupakan hak pemenuhan dasar yang wajib di miliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dengan bunyi bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh sebab itu, setiap rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memiliki rumah yang layak, karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, serta sebagai upaya dalam peningkatan taraf hidup. Hal ini yang menjadi cita-cita pemerintah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga masyarakat bisa meningkatkan keadaan hidup yang lebih sehat dan aman. Dimana rumah sendiri merupakan tempat untuk berlindung dari perubahan iklim maupun makhluk hidup lain yang berpotensi merugikan bagi penghuninya. Kelayakan sebuah rumah dapat mencerminkan kualitas hidup masyarakat, oleh karena itu ketidaklayakan sebuah hunian bisa menunjukkan bahwasanya masyarakat yang menempatnya masih di garis kemiskinan atau belum sejahtera.

Melihat permasalahan ini Pemerintah Kota Surabaya menggagas suatu program inovasi untuk mengatasi Rumah Tidak Layak Huni yang berada di Surabaya, program ini di kenal dengan nama Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan Tak Takut Kepanasan), program ini banyak melakukan penyesuaian dan terus di lakukan pengembangan. Program ini di atur dalam Perwali nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni kota Surabaya. Dalam pelaksanaanya program ini sudah diadakan dari tahun 2013 dan pada tahun 2018 program ini beralih pada penyebutannya yang awalnya pemberdayaan sosial masyarakat miskin menjadi Rehabilitasi rumah tidak layak huni atau lebih sering di sebut Tahu Panas sehingga pada ajang inovasi pelayanan publik yang di adakan pemerintah pusat program ini masuk ke dalam Top 40 inovasi pelayanan publik.

Dalam aturannya program Tahu Panas ini terdapat di bab 2 pasal 2 dimana program ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial dengan cara meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin dengan cara merenovasi kondisi rumah yang awalnya jauh dari kata sehat dan aman menjadi rumah yang sehat dan aman. Program ini juga didasari dengan beberapa prinsip yakni akseptabel, transparan, akuntabel, keterpaduan, kemitraan, kesetiakawanan, kemanfaatan, dan partisipasi. Adanya program ini di harapkan akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dimana terjadinya peningkatan kualitas hidup. Jika program seperti ini tidak diadakan maka akan dikhawatirkan muncul masalah-masalah baru seperti:

- a) Masalah kesehatan dimana jika hunian yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, dengan kondisi yang tidak layak untuk di huni akan berdampak pada kesehatan penghuninya, contohnya kedepannya ruangan, karena tidak adanya pencahayaan serta sirkulasi udara yang menyebabkan rumah tersebut terasa lembab dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan penghuni rumah
- b) Masalah pendidikan, jika hunian saja sudah masuk dalam kategori kebutuhan yang tidak bisa untuk di penuhi oleh masyarakat otomatis masyarakat akan lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti makanan dan pakaian ,sedangkan untuk pendidikan akan menjadi fokus kesekian sampai bahkan diabaikan karena masyarakat merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan.
- c) Masalah keamanan , dengan kondisi rumah yang jauh dari kata layak, rumah akan sulit untuk menjadi tempat perlindungan bagi penghuninya dimana saat terjadi pergantian cuaca yang ekstrim seperti panas, hujan, dan akhirnya terjadi banjir dan longsor rumah akan mudah roboh dan tidak akan kuat menahan tekanan dari cuaca tersebut. Hal ini akan membahayakan penghuni.
- d) Masalah keharmonisan rumah tangga akan terdampak hanya dengan kondisi hunian yang tidak layak untuk di tempati. Karena di dalam rumah setiap keluarga melalui banyak hal baik dari senang susah sedih sakit semua bisa terjadi di dalam rumah, dengan keadaan rumah tidak layak di huni perasaan yang di bawah oleh penghuni bisa saja tidak nyaman dengan keadaan tersebut sehingga emosi tidak dapat di kontrol, sehingga pertengkaran pasti akan sering terjadi antar satu dengan yang lain.

Dalam Pelaksanaanya Program Tahu Panas ini menggunakan pendekatan *bottom up* dan menggunakan konsep *Community Based Development*, dimana konsep ini ingin mewujudkan *redistribution of power* atau partisipasi masyarakat (*community participatory*) dari masyarakat yang dianggap lemah dan tidak mampu (Poerbo, 1999). Cara yang di lakukan dalam pembangunan lingkungan untuk rakyat yang berdasarkan pada upaya pemberdayaan serta dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah sehingga terjadinya keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran yang di inginkan. Selain adanya konsep partisipasi masyarakat dalam program ini juga menerapkan sistem pemberdayaan yang

dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman yang layak di daerah perkotaan, sehingga diharapkan tidak akan menjadi hambatan dari salah satu atau beberapa konsep pembangunan yang akan diwujudkan.

Dalam program Tahu Panas menggunakan konsep ini memberikan dampak dimana saat dilapangan kegiatan dilaksanakan berdasarkan aspirasi serta inisiatif masyarakat sehingga terjadinya *political choice*. Dalam kegiatan ini masyarakat memiliki kontribusi dan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan cara musyawarah dengan pihak Kesepakatan Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Sosial (KKPRS) hal ini bertujuan untuk memperluas sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah. Adapun data perkembangan pelaksanaan program Tahu Panas di kota Surabaya, sebagai berikut:



Gambar 1 Perkembangan Program Tahu Panas Pertahun
Sumber : Youtube SINOVIK Kementerian PARNB tahun 2020

Dari gambar di atas dapat dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2019 program Tahu Panas memiliki grafik yang terus meningkat, walaupun di tahun 2019 ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan hal ini membuktikan bahwasanya masih banyak sekali tempat tinggal yang tidak layak huni yang masih tersebar di seluruh kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya satu unit rumah diberikan dana pekerjaan sebesar 30 juta rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya. Saat tahun 2019, konsep hunian layak huni dan sehat menjadi fokus pembangunan saat itu. Dimana dengan terciptanya hunian yang nyaman, kuat, dan aman akan menekan jika ada masalah seperti aman dari ancaman konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran aman dari segala bentuk penyakit yang bisa menyerang seperti keadaan rumah yang tidak ada ventilasi udara dan cahaya.

Lebih lanjut untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada perbaikan rumah tidak layak huni dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan semua kegiatan pemerintah di fokuskan untuk menekan pertumbuhan persebaran Covid di Indonesia tak luput pula Kota Surabaya. Lalu pada tahun 2022 ini ada sedikit perubahan yang dilakukan dimana satu unit rumah diberikan biaya pelaksanaan pekerja sebesar 35 juta rupiah dengan target rumah yang akan direhabilitasi sebanyak 842 unit hal ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan di mana pada tahun-tahun sebelumnya perbaikan rumah layak huni bisa mencapai

ribuan. Adapun kriteria rumah yang masuk dalam kategori penerimaan bantuan Program Tahu Panas sebagai berikut:



Gambar 2 Contoh Rumah Tidak Layak Huni Yang Masuk Dalam Kriteria Program Tahu Panas

Sumber: Web Media Indonesia 2022

Gambar diatas merupakan salah satu contoh kriteria rumah hunian yang kurang layak untuk di tinggali yang mana masuk dalam spesifikasi program Tahu Panas. Adapun Kriteria yang wajib dimiliki yakni warga tersebut harus terdaftar dalam MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) atau masyarakat yang tidak mampu serta jelas akan akta kepemilikan tanah, sedangkan dalam perbaikannya yang diperbaiki juga harus memenuhi sejumlah kriteria diantaranya, dinding atau/dan atap dalam kondisi sudah rusak atau lapuk sehingga dapat membahayakan keselamatan penghuni. Kemudian, posisi lantai lebih rendah dari jalan dan lantai yang di gunakan masih terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik yang sudah rusak sehingga pecahannya bisa melukai penghuni. Selain itu, rumah yang tidak memiliki jamban atau wc atau sudah memiliki jamban tetapi kondisinya kurang layak seperti penutupnya tidak ada dan tidak ada saluran pembuangannya. Untuk menerima bantuan ini juga penerimanya wajib menandatangani sejumlah surat pernyataan yang di antaranya, Rumah/Tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dan tidak ada penolakan dari anggota keluarga.

Alur pelaksanaan program ini dimulai dengan adanya sosialisasi di tingkat kelurahan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, setelah di adakan sosialisasi pihak RT/RW akan mengumpulkan usulan calon penerima dan memberikan datanya kepada Dinas Sosial guna dilakukan verifikasi status MBR usulan calon penerima manfaat. Kemudian, menyampaikan hasil verifikasi kepada Lurah sebagai bahan musyawarah Kesekapakatan Rencana Perbaikan Rumah (KRPR). Pada tahap ini seringkali akan muncul beberapa masalah seperti skala prioritas utama akan di tuju pada kondisi rumah yang benar-benar butuh perbaikan. Menyikapi hal ini kerap kali masyarakat tidak menerima keputusan sehingga muncul rasa iri satu sama lain dan akhirnya timbulnya konflik antar warga, selain itu adanya kedekatan kekeluargaan dengan pihak-pihak yang bertugas akan mempengaruhi siapa dahulu yang akan menerima bantuan ini.

II. Landasan Teori

Implementasi

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya, Webster (Widodo, 2001; 191) dijelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Dalam analisa kebijakan Dye dan Jonnes (Dye dan Jones, 1971; 48) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksana suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Implementasi kebijakan adalah suatu pelaksana kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan (Sebatier dan Mazmania, 1986; 25).

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. Teori implementasi dari Van Meter Van Horn memiliki beberapa indikator seperti:

- a. Melihat standar sasaran, ukuran dan tujuan kebijakan dari program Tahu Panas.
- b. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung program Tahu Panas
- c. Karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan program
- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana program
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang berperan dalam pelaksanaan Program
- f. Serta dampak atau pengaruh Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam pelaksanaan program

Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Westra (1989:236) mengatakan bahwa "program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya". Siagian (dalam Westra 1989:124) mengatakan bahwa "penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu". Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas; b) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut; c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin; d) Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut; e) Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri; f) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro 1987:181).

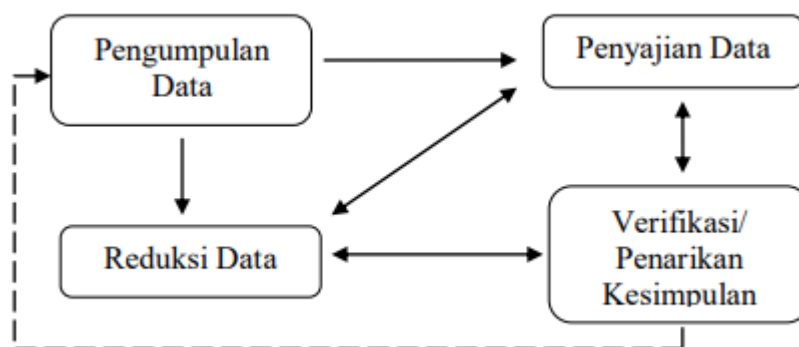
III. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya khususnya untuk pencarian dan pengumpulan data dilakukan pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu akan memaparkan dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat pelaksanaan program Tahu Panas melalui kegiatan observasi, kemudian semua peristiwa, kejadian dan gejala tersebut diuraikan dalam kata-kata yang tertulis melalui kegiatan pengolahan data. Setelah data dirasa cukup dan siap akan ditarik kesimpulan dari data tersebut melihat apakah Program Tahu Panas dalam pelaksanaannya berjalan baik atau tidak.

Dalam pelaksanaan Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan Tak Takut Kepanasan) Guna Merahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya peneliti akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang digunakan saat proses pelaksanaan program, serta apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung jalannya program Tahu Panas ini. Adapun cara peneliti melihat pelaksanaan program dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn, dan indikator-indikator teori ini yang akan menjadi fokus untuk dilakukan observasi, setelah semua data yang diperlukan sudah dikumpulkan maka akan diolah dan akhirnya akan dirangkum dan ditarik kesimpulan akhirnya apakah pelaksanaan program Tahu Panas ini berjalan dengan baik atau tidak.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi langsung di lapangan tempat pelaksanaan program Tahu Panas serta wawancara langsung dengan beberapa informan seperti 1 kepala seksi Rutilahu, 1 pendamping program dan 5 masyarakat penerima bantuan program Tahu Panas. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen hasil dari program Tahu Panas, arsip laporan pertanggungjawaban program dan tabel-tabel yang disediakan oleh Dinas Sosial mengenai perkembangan Program, serta data yang diperoleh dari responden dan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan program Tahu Panas.

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode: Observasi; Wawancara; dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti: Reduksi Data; Penyajian Data; dan Menarik Kesimpulan, seperti gambar 3 berikut:



Gambar 3 Komponen Dalam Analisis Data

Sumber : (Soegiyono, 2011)

IV. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Woll (1966) mengungkapkan bahwa kebijakan publik ialah jumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut. Dalam program Tahu Panas yang diatur di dalam perwali No.6 Tahun 2019 sendiri merupakan terobosan pemerintah kota Surabaya dimana pemerintah melihat masih jauh dari kata layak dihuni. Untuk itu program Tahu Panas di hadirkan guna mengatasi masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya ada 3 pengaruh tindakan pemerintah sehingga melaksanakan kebijakan ini yakni:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena dengan program Tahu Panas akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kota Surabaya. Dimana diketahui sendiri jika dengan keadaan rumah yang masih jauh dari kata layak akan menimbulkan masalah baru seperti masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan bahkan hubungan keluarga. Oleh karena itu, program ini hadir untuk mencegah adanya masalah lainnya muncul.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari kebijakan ini diatur didalam perwali nomor 6 tahun 2019 serta jumlah anggaran yang disediakan untuk per unit rumah sebesar 35 juta dan pelaporan pertanggungjawaban harus diserahkan per termin dana yang diberikan. Dalam program ini terdapat 3 termin pengeluaran dana pembangunan.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak dari program ini bisa dilihat bahwa kehidupan masyarakat kota Surabaya menjadi lebih baik, dimana masyarakat akhirnya memiliki hunian yang layak dan terhindar dari ancaman lingkungan luar.

Implementasi Program Tahu Panas

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation (1975)*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

a) Standar sasaran, Ukuran dan Tujuan Program Tahu Panas

Tujuan serta sasaran program Tahu Panas sudah sangat jelas, mulai dari pemerintah, para pelaksana hingga penerima bantuan paham betul tujuan dan sasaran program ini untuk mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya dengan membantu memenuhi salah satu kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, serta sasaran dari program ini yakni masyarakat dengan pendapatan ekonomi yang rendah dan masih jauh dari kata sejahtera. Serta kegiatan

pelaksanaan program ini sangat terikat dengan peraturan pemerintah yang terkait yakni Perwali nomor 6 tahun 2019.

Selain itu dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti antara pelaksana program dan penerima program memiliki sinergitas yang cukup baik sehingga partisipasi masyarakat yang menggunakan konsep *Community Based Development* yang di anut di dalam program ini juga berjalan dengan baik. Wujud keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Masyarakat dari awal sosialisasi oleh Dinas Sosial telah dilibatkan, guna mendapatkan informasi mengenai program Tahu Panas ini lalu saat sosialisasi selesai pihak RT/RW yang tergabung dalam LPMK akan turun survei untuk mendata calon penerima program, lalu setelah itu diadakan musyawarah penetapan penerimaan bantuan. Disaat penetapan penerima masyarakat bisa mempertanyakan mengenai kelayakan penerima bantuan, selain itu musyawarah ini masyarakat akan ada yang dipilih menjadi KTPR (Kelompok Teknis Pembangunan Rumah) hal ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan cukup mengambil peran yang cukup besar. Hal ini di sebabkan pelaksana program dan penerima program paham tugas serta fungsi mereka di dalam program ini.

b) Sumber Daya yang ada dalam Program Tahu Panas

Sumber daya yang tersedia dalam program ini jika di lihat memang perlu banyak perbaikan mulai dari sumber daya manusia sampai sumber daya bahan pembangunan yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program, karena adanya penerimaan profesi yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga perlu ada perbaikan dimana orang-orang yang ditugaskan sebagai pelaksana program sepatutnya orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Walaupun dilihat ada keterlambatan dalam proses pembangunan tetapi para pelaksana tetap berusaha menyelesaikan hingga akhir.

c) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Organisasi Pelaksana yang ada di dalam Program Tahu Panas cukup baik. Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti dapat di katakan bahwa seluruh pelaksana bersedia menjalankan program ini. Para pelaksana juga merasa kegunaannya bagi sesama karna di lingkungan sekita mereka tinggal masih banyak yang membutuhkan bantuan apalagi dalam halnya rumah dimana rumah menjadi salah satu aset yang bisa melindungi penghuninya dari ancaman dari lingkungan luar. Untuk itu para pelaksana dengan senang hati melakukan semua tugas mereka di tambah lagi karna memang para pelaksana merupakan orang-orang yang memang hidup di lingkungan tersebut.

d) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Komunikasi antar anggota pelaksana bisa di katakan cukup baik, dilihat dari seringnya penggunaan media komunikasi elektronik yakni WhatsApp dan tak lupa untuk mengenai surat tugas di kirimkan melalui Email para pelaksana. Selain itu para pelaksana dengan instansi-instansi terkait memiliki hubungan kerja sama yang cukup intens sehingga jika di hubungi setiap instansi tersebut sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan.

e) Sikap Para Pelaksana

Dalam Program Tahu panas antar pelaksana dan para penerima bantuan memiliki hubungan yang cukup baik. Dimana penerima bantuan dan pelaksana ikut bekerja sama

dalam pengerjaan pembangunan dan tetangga sekitar juga jika ada yang ingin membantu di perbolehkan, hal ini menunjukkan kedekatan antara pelaksana dan penerima program terjalin dengan baik.

f) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara dapat di lihat Program ini di dukung oleh pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala atau adanya aturan lain yang menyulitkan berjalannya program ini, selain itu dengan adanya pembangunan rumah yang layak akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga pada lingkungan sekitar keadaan sosial antara satu dengan yang lain dapat terjaga. Para penerima bantuan juga bisa memperbaiki keadaan ekonominya karena yang awalnya ada biaya yang di persiapkan untuk perbaikan rumah tetapi, dengan adanya program ini para penerima bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang lainnya. Melihat ini semua bisa di katakan dalam program ini tidak ada kendala dari pengaruh lingkungan luar, tetapi malah mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik.

IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya mengenai Implementasi dari program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan Tak Takut Kepanasan) dalam merahabilitasi atau memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang ada di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
Dalam Program Tahu Panas pengetahuan akan standar sasaran dan tujuan para pelaksana dan penerima program sudah cukup baik hal ini dapat di lihat dengan sering di adakannya sosialisasi mengenai program.
2. Sumber Daya Program Tahu Panas
Sumber Daya yang di sediakan oleh program ini masih kurang hal ini dapat di lihat dari sumber daya manusianya yang kurang ahli dalam bidangnya seperti dalam pembuatan LPJ, selain itu masalah dana yang di sediakan oleh pemerintah di rasa kurang karena dengan harga bahan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, di tambah lagi sumberdaya material bahan bangunan yang sering kali tidak tersedia oleh pemasok yang bekerja sama dengan pemerintah sehingga menghambat pembangunan rumah.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Para pelaksana di sini memiliki tugas dan posisi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dari awal perencanaan sampai pelaksanaan dengan baik.
4. Sikap Para Pelaksana
Dalam program ini para pelaksana sudah berusaha untuk selalu berkoordinasi antara satu dengan lainnya, walaupun program ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, tetapi sikap yang di hasilkan sangat profesional sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik.
5. Komunikasi Antar Organisasi terkait kegiatan pelaksana
Komunikasi yang di bangun sudah sangat baik dengan bekerjasama dengan berbagai dinas terkait yang mendukung program Tahu Panas salah satunya Dinas Pertanian

dimana guna mengecek sertifikat tanah yang di serahkan benar-benar asli atau tidak. Selain itu program ini menyebabkan transparansi antar pemerintah dan masyarakat benar-benar terlihat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat kepada pemerintah.

6. Dampak Lingkungan Sosil, ekonomi dan Politik

Dengan adanya program ini banyak sekali perubahan lingkungan sosial yang di ciptakan antara lain hilangnya rasa minder antar warga yang satu dengan lainnya perihal rumah yang layak dan tidak, selain itu perekonomian warga menjadi lebih baik karena tidak harus memikirkan dana untuk perbaikan rumah, program ini juga di dukung penuh oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2018 program ini masuk dalam 40 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia, selain dalam pengaruh lingkungan politik juga dapat di lihat adanya pembaharuan peraturan mengenai program rehabilitasi Rumah tidak layak huni yakni dari Perwali No. 6 tahun 2019 di perbaharui menjadi Perwali No. 9 tahun 2022 (Nasional et al., 2020) dengan letak perbedaannya pada dinas pelaksana program di alihkan yang semula di pegang oleh Dinas Sosial di alihkan kepada Dinas Perumahan Rakyat. Pada pelaksanaannya Program ini pada tahun 2021 telah membangun 623 Unit rumah dengan dana yang di realisasikan sebesar 20.559.000.000 miliar rupiah.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dirumuskan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Program ini sebaiknya terus dilakukan sampai benar-benar rumah yang berada di kota surabaya masuk dalam kategori rumah yang layak untuk di huni.
2. Dalam Masalah Sumber daya Manusia yang mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam program ini sebaiknya masyarakat yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya, agar untuk pemermasalahan sumberdaya manusia yang menghambat program bisa teratasi. Seperti mendata mahasiswa atau lulusan dari program studi yang berkenaan dengan program perbaikan rumah, salah satu contohnya arsitek dan lain sebagainya.
3. Untuk persediaan bahan baku bangunan sebaiknya pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan 1 atau 2 pemasok saja tetapi bekerja sama dengan semua pemasok bahan bangunan yang ada di kota Surabaya sehingga jika ada kendala mengenai bahan yang tidak tersedia pada pemasok yang satu masih ada opsi lain pada pemasok yang lainnya. Sehingga pembangunan tidak perlu di tunda karena harus menunggu barang yang sesuai ada.
4. Untuk dananya sendiri dimana 1 unit rumah di berikan sebesar 35 juta rupiah, jika dilihat dari harga barang yang tiap tahunnya naik tetapi spesifikasi bahan tidak berubah maka hal ini perlu di kaji kembali dimana pemerintah bisa menaikkan jumlah yang di keluarkan di sesuaikan dengan harga pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- ALFIANSYAH, R. H. 2021. (2019). No Title. In <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178453/>
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178453/>
- Anggara, S. (2014). Pengantar Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
- AV NINDI. (n.d.). *f7671bf82108a03891c2de0dba5575328bd9fdcf @ eprints.uwp.ac.id*.
<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3164/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020. In *Badan Pusat Statistik* (Issue 5).
- Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Budihardjo, Eko. (2009). Perumahan & Permukiman di Indonesia, Bandung : PT. Alumni.
- Hayat, H., Malang, U. I., Pendapatan, P., Berbasis, D., & Usaha, P. (2019). *Buku Kebijakan Publik. September*.
- Husaini Usman. (2008). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Houghton. (2012). Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta : Karya Salemba Empat.
- Idrus, Muhammad.(2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga: Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Irwan, Mulyanto, Ratna dewi. (2008). Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia .Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205.
<https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Lexi, & Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasin*, 54–68.
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Maslow, Abraham. (2010), *Motivation and Personality*, Jakarta: Rajawali.
- Mulyanto, Irwan.(2013). pembagunan perumahan dan permukiman di indonesia.
- Mulyadi, Deddy. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.Bandung:Alfabeta
- Musthofa, Bisri. (2008). Kamus Kependudukan, Yogyakarta: Panji Pustaka. Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan.
- Miranda, H. (2018). Teori dan Model Implementasi Publik. *ResearchGate, April*.

- Nasional, P., Penyusunan, C., Penyusunan, T. C., Pelaksanaan, E., Pembangunan, R., & Pemerintah, R. K. (2020). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 2017, 1–17.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi dan Implementasi*.
- Prayitno, Budi. (2012). *kesejahteraan rakyat atas papan akselerasi perumahan kebutuhan papan*. Jakarta: Adang Setiana.
- Ridho, Muhammad. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*, Semarang: Penerbit Unissula.
- Santoso, Urip. (2014). *Hukum Perumahan*. Surabaya : Kencana.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : CV Citra Intrans Selaras.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Utara, U. S. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam*.
- Vivi Gorahe, L., Waani, F., & Tasik, F. (1967). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bambahene Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(1), 5–24.
- Wonorejo, S. S., Merah, T., Susun, R., & Sewa, S. (2015). *Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 1965, 1–7. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf
- Yunus, S. (n.d.). *MODEL PEMBERDAYAAN*.